

DINAMIKA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA ERA PEMERINTAHAN KOLONIALISME JEPANG

Siti Aminah Lubis

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
minalubis2000@gmail.com

Zainal Efendi Hasibuan

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
zainal80.yes@gmail.com

Article History:

Received: Agustus, 9, 2024
Accepted: September 28, 2024
Published: Oktober, 5, 2024

Abstract. *This research aims to investigate the political dynamics of Islamic education during the period of Japanese colonialism, specifically focusing on its influence on Islamic educational institutions, curricula, and the religious identity of local communities. Through a qualitative approach involving historical analysis and document analysis, this research reveals how the Japanese colonial government manipulated Islamic education as a tool to achieve its political goals, including strengthening colonial domination and controlling public opinion. Apart from that, this research also explores the response and resistance of the local Muslim community to the educational politics imported by the Japanese colonial government. The results of this research provide in-depth insight into the complexity of the relationship between colonial power, religious education, and religious identity in the historical context of Islamic education under Japanese colonialism. It is hoped that the implications of these findings will contribute to a better understanding of the political dynamics of Islamic education and the interactions between colonial powers and local communities in specific historical contexts.*

Keywords:

Education Politics, Islamic Education, Colonialism, Japan and Indonesia

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dinamika politik pendidikan Islam selama masa pemerintahan kolonialisme Jepang, khususnya fokus pada pengaruhnya terhadap institusi pendidikan Islam, kurikulum, dan identitas keagamaan masyarakat setempat. Melalui pendekatan kualitatif yang melibatkan analisis sejarah dan analisis dokumen, penelitian ini mengungkapkan bagaimana pemerintah kolonial Jepang memanipulasi pendidikan Islam sebagai alat untuk mencapai tujuan politiknya, termasuk untuk memperkuat dominasi kolonial dan mengendalikan opini publik. Selain itu, penelitian ini juga menggali respons dan resistensi dari komunitas Muslim lokal terhadap politik pendidikan yang diimpor oleh pemerintah kolonial Jepang. Hasil penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas hubungan antara kekuasaan kolonial, pendidikan agama, dan identitas keagamaan dalam konteks sejarah pendidikan Islam di bawah pemerintahan kolonialisme Jepang. Implikasi temuan ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang dinamika politik pendidikan Islam dan interaksi antara kekuasaan kolonial dengan masyarakat lokal dalam konteks historis yang spesifik.

A. PENDAHULUAN

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan tidak terlepas dari sejarah perjuangan umat Islam, karena keterlibatan umat Islam Indonesia Sangat mewarnai gerak langkah perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan. Salah satu basis kekuatan politik Islam di Indonesia adalah pesantren yang dipimpin oleh kaum ulama, di mana ulama mendapat kedudukan terhormat dalam masyarakat. Sebagai pemimpin umat Islam, ia memiliki integritas kepribadian yang tinggi dan mulia tidak saja di bidang keagamaan, tetapi juga dalam bidang kemasyarakatan (Mubin 2020). Karena itu kaitan ulama dengan perubahan sosial harus dilihat pada perubahan kepemimpinan ulama, perubahan ulama tentang masalah sosial dan keagamaan yang dialami umat.

Pada Januari 1942 melalui Ambon, Jepang mendarat dan memasuki Indonesia. Masuknya Jepang ke Indonesia tidak dengan mudah atau langsung masuk tanpa perlawanan. Sebab pada saat itu KNIL (tentara Hindia Belanda) telah berusaha menghalangi masuknya Jepang ke Indonesia, tetapi usaha mereka tidak membuahkan hasil dikarenakan kekuatan (Ramadhani 2021).

Kehadiran Jepang di Indonesia telah berhasil menduduki tempat-tempat terpenting yang semula dikuasai Belanda. Penyerahan Hindia Belanda tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 maret 1942, maka berakhirilah kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Sejak itu pula kekuasaan Jepang secara resmi di Indonesia, sekarang Indonesia memasuki periode baru yaitu periode pendudukan militer Jepang. Sebagian rakyat Indonesia, khususnya di pulau Jawa menyambut baik atas kehadiran Jepang. Apalagi Jepang menggunakan pendekatan manusiawi lewat propaganda yang mampu menembus kebencian terhadap kolonialisme pada umumnya. Pidato penguasa Jepang mengena dalam hati sanubari bangsa Indonesia bahwa Jepang merasa bertanggung jawab untuk membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu

penjajahan Belanda, Indonesia akan dimasukkan dalam kesemakmuran bersama Asia Timur Raya dibawah Jepang.

Di samping itu, kebencian rakyat Indonesia terhadap kolonial Belanda semakin memperlemah kedudukan Hindia Belanda di Indonesia. Pendekatan Jepang terhadap umat Islam terealisasi dalam kebijakan politiknya yang memberi ruang gerak lebih leluasa untuk umat Islam untuk turut serta secara langsung dalam politik dan lathan militer. Jepang mendorong dan membeni prioritas dengan mendirikan organisasi sendiri, sedangkan organisasi kalangan nasionalis yang netral agama tidak digalakan. Seperti halnya pada tanggal 10 September 1943 pemerintah Jepang menghidupkan kembali organisasi Muhammadiyah dan NU, disusul berdirinya Perserikatan Umat Islam (PUI) di Majalengka dan Sukabumi. Sedangkan organisasi Taman Siswa yang berorientasi dalam pendidikan dibatasi ruang geraknya. Hal ini tidaklah berarti selalu mengikuti kepada Jepang, banyak hal-hal yang diperaktekan Jepang berlawanan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Hal ini menjadikan sebagian tokoh Islam menarik diri kerjasama dengan Jepang, sehingga muncul pemberontakan yang dipimpin oleh ulama, seperti yang terjadi di Singapura (Tasikmalaya) dipimpin oleh Kyai Zaenal Mustofa, kemudian disusul Indramayu, Aceh, dan Blitar (Wardah 2010).

Sistem pendidikan yang di anut oleh Jepang untuk Indonesia sangat membuat rakyat Indonesia menderita, karena pendidikan yang diberikan oleh Jepang berbeda jauh dengan pendidikan pada masa kolonial Belanda (Syarif 2019). Jepang memberikan pendidikan di Indonesia hanya untuk keuntungan pribadinya saja, Jepang hanya sekedar membudakan rakyat Indonesia melalui pendidikan, karena pendidikan yang di berikan oleh Jepang lebih untuk kemiliteran bahkan rakyat Indonesia menjadi buruh pada masa pendudukan Jepang . Sistem pendidikan Indonesia pada masa pendudukan Jepang tidak terlalu lama kurang lebih hanya 3 tahun saja (1942-1945), namun memberikan dampak yang sangat besar bagi rakyat Indonesia. Jepang membuka sekolah untuk seluruh lapisan Masyarakat, tidak hanya kalangan bangsawan saja. Jepang juga menawarkan sekolah rakyat (Kokumin Gakko) untuk Pendidikan

dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah kejuruan. Selain itu, Jepang juga banyak menanamkan ideologi mental kebangsaan dengan memberlakukan tradisi seperti menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, senam bersama menggunakan lagu Jepang (Taiso), mengibarkan bendera, dan penghormatan terhadap kaisar (Setiawati 2019).

Pada masa Jepang, pendidikan dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan Jepang yang hendak menghapus pelajaran agama islam menggantinya dengan pelajaran agaman Shinto, oleh karena itu bahasa dan aksara arab dikurangi frekuensinya, serta pendidikan pada umumnya mendapat penekanan. Karena Jepang menyadari untuk me-Nipponkan bangsa Indonesia dengan jalur pendidikan dan Jepang juga merubah kurikulum pendidikan (Iskandar and Ansori 2022)

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode historis dengan pendekatan analisis dokumen. Metode penelitian historis adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menganalisis peristiwa, perkembangan, dan fenomena masa lalu. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber primer dan sekunder seperti dokumen, arsip, catatan, artefak, dan sumber lisan. Tujuan utamanya adalah untuk merekonstruksi dan menginterpretasikan kejadian-kejadian masa lalu untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang sejarah. Proses ini melibatkan penelusuran, pengumpulan, verifikasi, dan analisis data historis untuk menyusun narasi yang akurat dan berimbang.

Langkah pertama dalam metode penelitian historis adalah identifikasi masalah atau pertanyaan penelitian yang spesifik. Peneliti kemudian mengumpulkan data yang relevan dari berbagai sumber primer seperti surat, laporan resmi, dan dokumen sejarah lainnya, serta sumber sekunder seperti buku, artikel, dan makalah penelitian yang telah ada. Sumber primer memberikan informasi langsung dari periode yang diteliti, sedangkan sumber sekunder memberikan analisis dan interpretasi yang telah dilakukan oleh

peneliti lain. Penting untuk mengevaluasi kredibilitas dan keandalan sumber yang digunakan untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah kritik sumber. Kritik sumber adalah proses evaluasi untuk menilai keaslian, kredibilitas, dan relevansi sumber sejarah. Kritik eksternal melibatkan pengecekan otentisitas dokumen seperti penulis, tanggal, dan konteks pembuatannya, sedangkan kritik internal berfokus pada isi dokumen, apakah informasi di dalamnya konsisten dan sesuai dengan fakta-fakta lain yang diketahui. Tahap ini sangat penting untuk menghindari kesalahan interpretasi dan memastikan bahwa data yang digunakan dapat dipercaya.

Tahap akhir dalam metode penelitian historis adalah penyusunan dan interpretasi data. Peneliti menyusun data yang telah diverifikasi ke dalam narasi yang koheren dan logis. Analisis data dilakukan untuk memahami hubungan sebab-akibat antara peristiwa dan untuk mengidentifikasi pola-pola atau tema-tema yang muncul dari data. Peneliti juga harus mempertimbangkan konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi peristiwa yang diteliti. Hasil akhir dari penelitian ini adalah sebuah laporan atau tulisan ilmiah yang memberikan gambaran komprehensif tentang peristiwa masa lalu dan kontribusinya terhadap pemahaman sejarah.

Adapun sumber data yang digunakan meliputi arsip-arsip Kolonial, dan literatur sekunder. Analisis dilakukan untuk memahami konteks dan implementasi kebijakan pendidikan serta respon dari masyarakat Muslim terhadap kebijakan tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendidikan Islam Masa Pemerintahan Kolonialisme Jepang di Indonesia

Sejarah pendidikan Islam telah menunjukkan bahwa sejak perkembangan Islam, pendidikan mendapat prioritas utama masyarakat muslim Indonesia. Di samping besarnya arti pendidikan, kepentingan Islamisasi mendorong umat Islam melaksanakan pengajaran Islam, kendati masih dalam sistem yang sederhana. Pengajaran diberikan dengan sistem

halaqah yang dilakukan di mesjid, musalla bahkan juga di rumah ulama. Di samping itu pendidikan mengalami perubahan dan perkembangan sehingga orang mengatakan bahwa pendidikan sekarang merupakan perkembangan pendidikan masa lalu (Susmihara 2013).

Namun demikian mengelola pendidikan tidaklah begitu mudah semudah membalik telapak tangan, sebab apabila pendidikan tersebut salah urus maka outputnya pun akan terlahir tidak seperti yang diharapkan, apalagi jika kesalahan tersebut sengaja di adakan seperti apa yang dilakukan oleh para penjajah Belanda dan Jepang sebelum masa kemerdekaan terhadap pendidikan bangsa Indonesia. Efek dan akibat dari pendidikan penjajah tersebut, menjadikan sektor pendidikan di Indonesia hingga saat ini masih morat-marit.

Sebelum kedatangan penjajah, Indonesia telah dihuni oleh beberapa Kerajaan Islam yang telah memiliki sistem pendidikan yang berbeda dengan sistem pendidikan yang diamanatkan oleh penjajah Belanda dan Jepang (Zulfa 2020). Bagaimana sistem pendidikan yang dilakonkan di Indonesia pada masa Kerajaan Islam dan masa penjajahan. Pendidikan Islam di Indonesia tumbuh dan berkembang seiring dengan masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara (Saputra 2021), demikian pula sistem pendidikan yang dulunya dibentuk oleh kerajaan-kerajaan Islam, setelah kedatangan para penjajah di Indonesia kondisi pendidikan Islam mengalami tekanan akibat kebijakan-kebijakan yang diberlakukan bertentangan dengan tujuan pendidikan Islam. Hal ini menarik dikaji lebih jauh untuk mendapatkan gambaran yang lebih dalam. Pendidikan Islam di zaman penjajahan Jepang terkait erat dengan saling membutuhkan antara Jepang dan umat Islam di Indonesia. Jepang membutuhkan umat Islam Indonesia terkait dengan perang Asia Timur Raya, agar pihak Jepang mendapat bantuan dari umat Islam Indonesia . Sedangkan dari umat Islam mengharapkan akan diperoleh kemerdekaan Indonesia. Di depan ulama, Letnan Jendral Imamura, pejabat militer Jepang di Jawa menyampaikan

pidato yang isinya bahwa pihak Jepang bertujuan untuk melindungi dan menghormati Islam.

Kebijakan Jepang secara umum tersebut tentu pula berpengaruh pada kebijakan dalam hal pendidikan Islam di Indonesia. Pengaturan pendidikan agama juga diberlakukan pada masa pendudukan penjajah Jepang. Meskipun pada esensinya pengaturan itu juga dilakukan untuk mengawasi lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada di masyarakat, namun Jepang tampak sedikit lebih lunak dibanding pemerintah penjajah Belanda. Mungkin karena keberadaannya di bumi Indonesia yang masih seumur jagung, sehingga mereka merasa perlu untuk mengambil hati umat Islam. Jepang bahkan menawarkan bantuan dana bagi madrasah, serta membiarkan masyarakat membuka kembali madrasah-madrasah yang pernah ditutup oleh pemerintah penjajah Belanda (Anwar, 2020).

Jepang, awalnya memberi prioritas umat Islam di Indonesia untuk mengembangkan pendidikan Islam utamanya syiar Islam, hal itu merupakan siasat yang dijalankan Jepang untuk kepentingan Perang Dunia II terbukti setelah Jepang mendapat tekanan dari sekutu justru Jepang memperlihatkan dirinya sebagai penjajah yang lebih kejam dari Belanda. Rakyat dipaksa untuk bergabung dengan badan pertahanan Jepang sehingga pendidikan rakyat terbengkalai. Meskipun di bawah penindasan Jepang, masih ada madrasah-madrasah yang bisa jalan dalam lingkungan pesantren di mana lingkungan tersebut jauh dari jangkauan Jepang sebab pada umumnya pesantren terletak pada daerah terpencil.

2. Peran Ulama pada Masa Pemerintahan Kolonialisme Jepang

Runtuhnya kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia ke tangan Jepang yang berlangsung sangat singkat sungguh telah menimbulkan kekaguman bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini juga memberikan harapan bagi Indonesia untuk segera merdeka. Sambutan penuh kegembiraan atas kedatangan Jepang tidak bertahan lama karena harus bergeser ke perasaan takut, khawatir, curiga dan benci. Kemelaratan, kesengsaraan, dan

penindasan terjadi di mana-mana. Romusha dan pengawasan menakutkan dari polisi militer Jepang (Kempeitei) juga terjadi di mana-mana. Romusha dikerahkan untuk meningkatkan kondisi keamanan musuh dan guga pertahanan (Budisantosa n.d.). Kempeitei ini seringnya mengambil sikap pukul dulu, perkara baru diusut kemudian. Setiap orang yang “diambil” Kumpeitei ini jangan harap dapat keluar hidup atau seperti keadaan sebelumnya. Banyak romusha yang dikirim ke pedalaman Burma dan Thailand untuk membangun jalur kereta api yang menghubungkan Burma dengan Bangkok melalui Kanbury.

Romusha adalah penduduk Indonesia yang dipaksa oleh pemerintahan pendudukan Jepang Untuk bekerja secara paksa dalam proyek infrastruktur, contohnya membngun jalan, Pelabuhan, landasan pacu, serta proyek konstruksi lainnya (Rosmaida Sinaga 2024). Romusha yang dipekerjakan ke luar negeri maupun dalam negeri diperlakukan sangat buruk. Selain kondisi-kondisi yang memprihatinkan di atas ada satu hal lagi yang lebih menyakitkan bagi bangsa Indonesia yaitu banyaknya gadis Indonesia yang dikerahkan untuk menghibur tentara Jepang di rumah-rumah kuning. Pada awalnya, gadis-gadis ini tidak tahu bahwa mereka akan melakukan pekerjaan nista itu karena mereka dijanjikan akan dikirim ke Tokyo untuk melanjutkan studi. Pada kenyataannya mereka dijadikan mangsa serdadu Jepang di Shonaton (Singapura) atau di tempat lain. Ribuan di antara mereka banyak yang hilang atau menjadi gila. Berbagai kebijakan Jepang yang diterapkan bagi bangsa Indonesia umumnya dan umat Islam khususnya ini kemudian mendapatkan reaksi yang beragam dari umat Islam, bahkan sejak tahun pertama pendudukannya di Indonesia Jepang sudah kehilangan kepercayaan dari umat Islam (Rizal 2014).

Ketidakpercayaan umat Islam ini kemudian merembet ke sikap permusuhan di kalangan pemimpin-pemimpin organisasi Islam maupun ulama secara individual terhadap Jepang sendiri. Sikap pemimpin-pemimpin organisasi Islam umumnya masih mau bekerja sama dengan Jepang selama Jepang tidak menghina Islam.

Adapun para ulama individual melahirkan penolakan dengan melakukan perlawanan. Dengan demikian berarti para pemimpin organisasi lebih moderat dalam menyikapi kebijakan Jepang, sedangkan ulama secara individual lebih keras (Solichin and Anwar 2020). Dalam menghadapi umat Islam, pemerintah Jepang sebenarnya mempunyai kebijakan politik sama dengan Belanda, hanya dalam awal pendekatannya Jepang memperlihatkan sikap bersahabat. Karena Jepang berkeyakinan umat Islam merupakan kekuatan yang paling besar dalam menghadapi sekutu.

Dalam upaya membangun dan mempertahankan kekuasaannya serta keberadaan di dunia internasional, Jepang mengalihkan perhatiannya pada kalangan Islam, persamaan ideologi menentang kekuasaan Barat akan dimanfaatkan Jepang untuk mencoba mengadakan kerja sama dalam menentang Barat (Belanda) (Imamah 2015). Lebih penting lagi bagi Jepang bahwa Jepang akan memanfaatkan potensi umat Islam yang sangat banyak serta mempunyai kemampuan mobilisasi yang tinggi.

Dalam upaya mendapatkan hati masyarakat Indonesia, Jepang banyak sekali melakukan banyak kesalahan, salah satunya adalah Seikeirei. Karena bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam, banyak sekali penolakan yang dilakukan para ulama karena bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ulama sendiri menolak aktivitas tersebut karena hal ini dianggap musyrik. Selain itu militer Jepang juga menerapkan kerja paksa (Romusha) pada rakyat Indonesia untuk kepentingan perang melawan sekutu. Hal tersebut mendapat tanggapan yang sama dari ulama yaitu penolakan.

Pada masa pendudukan militer Jepang, ulama banyak memiliki peran yang sangat besar untuk mengusir para militer Jepang yang berkuasa. Peran tersebut dilakukannya karena melihat adanya penjajahan yang dilakukan oleh militer Jepang. Peran yang dilakukan ulama antara lain ialah menyadarkan masyarakat, membuat pasukan, dan memimpin perang seperti yang dilakukan oleh K.H Zaenal Muthafa. K.H Zaenal Musthafa

adalah seorang ulama yang berasal dari kota Tasikmalaya dan pimpinan pesantren Sukamanah (Abdussalam 2019). Ulama tersebut melakukan peranya karena melihat adanya penjajahan yang dilakukan militer Jepang ketika itu. Peran yang dilakukan pertama kali adalah menyadarkan masyarakat tentang adanya penjajahan, membuat pasukan perlawanan, dan memimpin perang.

Selain peran yang dilakukan ulama dimedan perang, ada juga peran ulama yang dilakukan didalam pemerintahan Jepang yaitu K.H Hasyim Asy'Ari. K.H. M. Hasyim Asy'ari merupakan salah satu ulama besar yang memiliki peran dalam perjuangan melawan pemerintah kolonial (Yusrianto 2014). Peran yang dilakukanya adalah membuat sebuah pasukan santri yang dilatih oleh militer Jepang yang diberi nama pasukan Hizbullah. K.H Hasyim Asy'ari juga diangkat sebagai ketua Shumubu (Departemen Agama) dan Masyumi (Majelis Syuro Muslimin) (Hamidah 2018). Meski Jepang mendapat sambutan baik dari umat Islam, akan tetapi di awal kedatangannya Jepang mengalami masalah karena penerapan aturan seikerei. Sebagaimana yang terjadi terhadap K.H. Zainal Musthafa dari Singaparna yang dijatuhi hukuman mati karena tidak mau melakukan seikerei (Annisa Rizky Fadilla 2023). Selain itu Hasyim Asy'ari juga berjuang dengan anaknya yang bernama K.H Hamid Hasyim untuk perundingan bersama pihak militer Jepang.

Perjuangan yang dilakukan oleh ulama ketika itu begitu besar. Banyak sekali ulama yang ikut andil dalam peperangan maupun dalam internal Jepang. ulama memiliki peran penting dalam melakukan perlawanan terhadap militer Jepang ketika itu (Hutapea, Sitohang, and Naibaho 2024). Sebelum berperang ulama memberikan peran mendakwahi para santri dan warga sekitar untuk melakukan perlawanan terhadap militer Jepang dengan memberikan semangat Jihad Fisabilillah. Ulama memang mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, mereka lebih berpengaruh daripada kepemimpinan dari golongan priyayi (Ittidihadiyah, dkk. 2011).

D. KESIMPULAN

Pada masa kolonialisme Jepang di Indonesia, yang berlangsung dari tahun 1942 hingga 1945 selama Perang Dunia II, politik pendidikan Islam mengalami beberapa perubahan dan dinamika. Ini merupakan periode yang menarik di mana kebijakan pendidikan di Indonesia secara umum mengalami transformasi yang signifikan di bawah pemerintahan Jepang.

Politik Pendidikan Islam pada Masa Pemerintahan Kolonialisme Jepang menunjukkan bahwa pemerintah kolonial Jepang menggunakan pendidikan Islam sebagai instrumen untuk mencapai tujuan politiknya, termasuk untuk mengukuhkan dominasi kolonial dan mengendalikan opini publik di wilayah yang mereka kuasai. Pengaruh mereka terhadap institusi pendidikan Islam dan perubahan kurikulum mencerminkan upaya aktif untuk mengarahkan pemahaman dan praktik keagamaan masyarakat lokal sesuai dengan kepentingan kolonial. Meskipun demikian, respons dan resistensi dari komunitas Muslim lokal juga terlihat, menunjukkan kompleksitas dalam interaksi antara kekuasaan kolonial dan identitas keagamaan dalam konteks historis yang spesifik tersebut.

Begitupun perjuangan yang dilakukan oleh ulama ketika itu begitu besar. Banyak sekali ulama yang ikut andil dalam peperangan maupun dalam internal Jepang. Ulama memiliki peran penting dalam melakukan perlawanan terhadap militer Jepang ketika itu. Sebelum berperang ulama memberikan peran mendakwahi para santri dan warga sekitar untuk melakukan perlawanan terhadap militer Jepang dengan memberikan semangat Jihad Fisabilillah. Ulama memang mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, mereka lebih berpengaruh daripada kepemimpinan dari golongan priyayi.

REFERENSI

Abdussalam, Tatang Hidayat dan Aam. 2019. "ASY-SYAHID KH. ZAINAL MUSTHAFA DAN PERLAWANAN SUKAMANAH :PERSPEKTIF SEJARAH DAN PENDIDIKAN." *Journal of Islamic Studies* 23(2):3.

Annisa Rizky Fadilla, Dkk. 2023. "HUBUNGAN NAHDLATUL ULAMA

DENGAN NEGARA BANGSA INDONESIA MASA PRAKEMERDEKAAN HINGGA AWAL KEMERDEKAAN (1926-1945).” *JURNAL PENELITIAN* 1(2):11.

- Budisantosa, Akal. n.d. “PENGGERAHAN ROMUSHA DALAM PEMBANGUNAN GUA-GUA PERTAHANAN JEPANG DI MRANGI, PUNDONG, BANTUL.” 712.
- Hamidah, Jumeroh Mulyaningsih & Dedeh Nur. 2018. “LASKAR SANTRI PEJUANG NEGERI: Rekam Jejak Laskar Hizbullah Dalam Pertempuran 10 November 1945 Di Surabaya.” *Jurnal Tamaddun* 6(2):4.
- Hutapea, Dea, Desman Sitohang, and Siti Mawar Naibaho. 2024. “ORGANISASI KEAGAMAAN PADA MASA PERGERAKAN NASIONAL: NAHDLATUL ULAMA (NU) 1926-1945.” *Jurnal Pengembangan Pendidikan* 8(5):91.
- Imamah, Dinno Munfaizin. 2015. “Siasat Dakwah Nahdlatul Ulama (NU) Era Penjajahan Jepang.” *Jurnal Bimas Islam* 8(2):167.
- Iskandar, Khusnan, and Ahmad Syahrul Ansori. 2022. “Pendidikan Islam Masa Pra Kemerdekaan; Telaah Kebijakan Pendidikan Islam Masa Penjajahan.” *Journal of Education and Religious Studies(JERS)* 2(2):49.
- Ittidihadiyah, dkk., Himayatul. 2011. *Islam Indoesia Dalam Studi Sejarah, Sosial, Dan Budaya (Teori Dan Penerapan)*. Yogyakarta: Pusat Kajian Sejarah dan Budaya Islam (PKSBI).
- Mubin, Fatkhul & Abd Aziz. 2020. “POLITIK PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA : PERLAWANAN PESANTREN.” *Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 3(1):123–36.
- Ramadhani, Suci. 2021. “Sejarah Perkembangan Pendidikan Indonesia Pada Masa Penjajahan Jepang.” *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan* 8(1):11.
- Rizal, Alvin Noor Sahab. 2014. “Pergerakan Islam Indonesia Masa Jepang (1942-1945).” *Jurnal Indo-Islamika* 4(2):180.
- Rosmaida Sinaga, Dkk. 2024. “DAMPAK PENGGERAHAN TENAGA RAKYAT PADA KEDUDUKAN JEPANG.” *Jurnal Pengembangan Pendidikan* 8(5):96.
- Saputra, Fedry. 2021. “SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA.” *Jurnal AL-HIKMAH*

3(1):98.

Setiawati, Sholeha dan Elis. 2019. "1, 2 1 2." *Jurnal Swarnadwipa* 5(3):132.

Solichin, Mujiyanto, and M. Ansor Anwar. 2020. "Gerakan Sosial Keagamaan Pendidikan Islam Masa Kolonialisme Pendahuluan Perasaan Keterasingan , Kebingungan Dan Tidak Puas Terhadap Sistem Pendidikan Yang Diciptakan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda , Membias Pada Pola Pemikiran Kaum Intelektual Pemimpi." *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 6(1):76.

Susmihara. 2013. "PENDIDIKAN ISLAM MASA PENJAJAHAN BELANDA DAN JEPANG." *Jurnal Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan* 1(1):111.

Syarif, M. 2019. "POLITIK ETIS PEMERINTAH KOLONIAL HINDIA." *Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama & Kebudayaan* 5(1):2.

Wardah, Eva Syarifah. 2010. "Kiprah Ulama Dalam Politik Pada Masa Pendudukan Jepang Di Indonesia (1942-1945)." *Al-Fath* 04(01):84.

Yusrianto. 2014. "PEMIKIRAN POLITIK DAN PERJUANGAN KH. M. HASYIM ASY'ARI MELAWAN KOLONIALISME." *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 3(2):260.

Zulfa, Sukmurdiyanto Sukmurdiyanto dan Mona Yulia. 2020. "KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI NUSANTARA SEBELUM KEMERDEKAAN: KASUS KEBIJAKAN POLITIK KOLONIAL BELANDA DAN JEPANG TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA." *Jurnal Kajian Keislaman* 10(2):5-7.